

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme*, PT. Reflika Aditama, Bandung.

-----, 2004, *Terorisme: Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Ali Masyhar, 2002, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar maju, Bandung.

-----, 2009, *Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. CV. Mandar Maju Bandung.

Arie Ambarwati, 2018, *Perilaku Dan Teori Organisasi*, MNC Publishing, Malang.

Adi Suryadi Culla, 2006, *Rekonstruksi Civil Society Wacana Dan Aksi Ornop Di Indonesia LP3ES*, Jakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2010, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

-----, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta.

-----, 2008, *Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia*, Semarang.

-----, 1982, *Masalah Pemidanaan Sehubungan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Modern*", Kertas Kerja, Pada Seminar, Perkembangan Delik Khusus Pad Amasyarakat Yang Mengalami Modernisasi BPHN-FH Unair, Bina Cipta. Bandung.

-, Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Ke-5 Kencana Jakarta.
- , Muladi, 2009, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.
- Chairul Huda, 2011, Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Kencana, Jakarta.
- C Hulsman, 1984, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*, Penyadur, Soedjono Dirdjosisworo, CV: Rajawali Pers, Jakarta.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, 2005, Alumni, Bandung.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Hamzah Hetrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HR Ridwan. 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Radja Grafindo. Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-4, PT. Alumni, Bandung.
- , 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta.
- , 2004, *Bahan Seminar 'Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus'*, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1989, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

- Muchamad Ali Safa'at, 2011, Pembubarn Partai Politik, Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, PenerbitKencana, Jakarta.
- Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 1994, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Ctk. Kesepuluh, Kencana, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung.
- Roeslan Saleh 1983, Suatu Reorienasi dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suwoto Mulyosudarmo, 1997, Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara, Gramedia, Jakarta.
- Sudarto, Hukum Pidana I, 2013, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- S. R. Sianturi, 1996, Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Seno Adji, Seno Adji, Indrianto, 2001, Terorrisme dan HAM (Tragedi Umat Manusia), OC Asiation : Jakarta.
- Tri Andrisman, 2009, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, 2010, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Otje Salman S., dan Anthon F. Susanto, 2007, Teori Hukum, PT Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung

B. JURNAL

Ardiko G.M Sitompul, Haryadi, dan Tri Imam Munandar, Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *PAMPAS : Journal Of Criminal*, Vol.1, No.3, 2020.

Antari Eva Ditayani Putu, Pengaturan Larangan Dan Sanksi Organisasi Masyarakat (Ormas) Sebagai Pembatasan Hak Berserikat Dalam Negara Demokrasi. *Jurnal Hukum Undiknas*, Vol 2 No 2 (2015).

Ali Musri Semjan Putra, *Segi-Segi Pelanggaran Terorisme Terhadap Syari'at Islam*, Jurnal Al-Majaalis, Vol. 2, No. 2, 2015.

Ar Saleh, Perlindungan data pribadi dalam perspektif kebijakan hukum pidana, *Jurnal Hukum*, Vol 1, No. 1 Tahun 2021.

Catur Wibowo dan Herman Harefa, "Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah," *Jurnal Bina Praja* , 2015.

Ferdinandus Kila dkk., Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana, *jurnal konstruksi hukum* Vol 4 No.1 – Januari 2023.

Hafrida, Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri Ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.1, 2014.

Hotma Tarulina., Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. *JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2*, OKTOBER 2017.

Hery Firmansyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 2, 2011.

Indriani Berlian Mawengkam, Kajian Yuridis Cyber Crime penanggulangan dan penegakan hukumnya, *jurnal Lex Crimen* Vol.10 No.5 Tahun 2021.

Iar Sugarsih, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Illegal Fishing Dihubungkan Dengan Undang-

Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, *Jurnal, Universitas Pasundan*, 2016.

Khairun Nisa dan Annas Rolli Muchlisin, Ambivalensi Jihad Dan Terorisme: Tinjauan Analisis Semantik-Kontekstual Ayat-Ayat Jihad, *Jurnal Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 17, No. 1, 2018.

L.S. Susanto, "Tujuan Kriminologi terhadap Perilaku Menyimpang dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Tamat Suryani, Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme, *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Michael Sharon Rembet, Larangan Bagi Organisasi Kemasyarakatan Dan Pemberlakuan Sanksi Administratif, *Lex Administratum*, Volume.VIII/Nomor 4, Tahun 2020.

Muhammad Reza Winata, Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah. *Jurnal Penelitian Hukum. De Jure*, 2020.

Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggung jawaban dalam tindak pidana, *Humaniora*, Vol.3 No.2, Tahun 2012.

R Rodliyah, A Suryani, L Husni, Konsep Pertanggung jawaban pidana korporasi (*Corporate Crime*) dalam sistem hukum pidana indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol 5 No.1 Tahun 2020.

Ryan Aditama, Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2019.

Richard Card, Dalam Hanafi, Reformasi Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum* No 11, Vol 6, 2009.

Rudy Prasetya, "Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi", Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 23-24 Nopember 1989.

Syukri Kurniawan, Anditya Rahayu Putri, Tendy Septiyo, dan Pujiyono, Upaya NonPenal Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Terorisme Dengan Program Deradikalisasi Di Indonesia, *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 4, No. 1, 2020.

Siti Nisrima, Muhammad Yunus dan Erna Hayati, *Pembinaan Perilaku Sosial Remaja* Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, 2016.

Tini Apriani, "Pengawasan Ormas Asing dalam Menjaga Ketahanan Nasional di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Matra Pembaruan*, Vol.2 No.2 2018.

Tirta Nugraha Mursitama, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2011.

Wibowo Catur dan Herman Harefa. Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah (*Urgency of Community Supervision Organization By Government*) *Jurnal Bina Praja*, Volume 7 Nomor 1 Edisi Maret 2015.

Wiwik Afifah, "Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Supremasi*, Vol.8 No.2, 2018.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

D. ARTIKEL DAN INTERNET

Appe Hamonangan Hutauruk, Kesalahan dalam Arti Luas dan Melawan Hukum Pidana, <https://appehamonanganhutauruk.com>, akses pada tanggal 15 Februari 2025 https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_organisasi_terlarang_di_Indonesia, diakses pada tanggal 12 maret 2025.

Budi Setya Andhi, Subarkah dan Suparno. Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia.

Mursitama Nugraha Tirta. Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2011.

Ewit Soetriadi, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dengan Hukum Pidana, Semarang: Thesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.